

PENGARUH PERAN LEGISLATIF TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA STUDI DI DESA RANDU AGUNG KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER

Aldy Zahwa P¹, Baktiawan Nusanto²

Program Studi Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Jember

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2024

Revised Juli 2024

Accepted Juli 2024

Available online Juli 2024

e-mail: 41dyzp@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh peran legislatif terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Randu Agung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang didistribusikan kepada responden. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur persepsi dan pengalaman responden terkait peran legislatif dalam pembangunan infrastruktur desa. Variabel yang diteliti meliputi pengaruh kekuatan legislatif dan pertimbangan pilihan rasional terhadap prioritas pembangunan dan kebijakan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan skala Likert dan berbagai uji statistik untuk menguji validitas, reliabilitas, serta korelasi antar variabel. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran konkret mengenai sejauh mana peran legislatif berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur desa, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas peran legislatif dalam

pembangunan desa.

Kata Kunci :Peran legislatif,Pembangunan infrastruktur desa,Desa Randu Agung,Kecamatan Sumberjambe,Kabupaten Jember

Abstract

The research seeks to assess the impact of the legislative function on the infrastructure development of Randu Agung village in the Sumberjambe district of Jember district. The research used a quantitative approach, with questionnaires as the primary data gathering tool delivered to the participants. The questionnaire aims to assess respondents' perspectives and experiences about the law's impact on village infrastructure development. The factors examined include the impact of legislative authority and rational decision-making deliberation on development and policy preferences. The acquired data is further examined using the Likert scale and a range of statistical tests to assess the validity, reliability, and association among variables. The research is anticipated to provide a definitive understanding of how the legislative function impacts the growth of village infrastructure. Additionally, it will give policy suggestions to improve the efficacy of legislative roles in village development. The legislative function, village infrastructure development, resource conservation, and Randu Agung village are all part of the Jember district.

Keywords: Legislative role, Village infrastructure development, Randu Agung village, Resource conservation, Jember district

I. PENDAHULUAN

Untuk pertumbuhan terjadi, semua orang dalam masyarakat perlu memainkan peran dan pemerintah perlu membiarkan orang-orang melakukan bagian mereka. Agar proses pertumbuhan mencapai tujuannya, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam harmoni. Dari tingkat nasional sampai tingkat desa, kerja harus dilakukan. dari Nurcholis (2013) Berdasarkan konsep Pancasila, pembangunan pedesaan adalah proses yang berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental,

material, dan spiritual orang-orang di sebuah kota. Tujuan dari pertumbuhan adalah untuk membuat kehidupan orang menjadi lebih baik di beberapa tempat. Menjadi miskin dan hidup dalam damai berjalan bersama seperti angin dingin. Ini adalah kewajiban nasional yang pemerintah setuju untuk mempertahankan, yang mencakup kewajibannya untuk menjaga orang-orang aman dan melindungi mereka. Hal utama yang membuat negara menjadi ekonomi adalah bahwa aturan dasarnya tidak sepenuhnya berlaku. Tidak ada diskriminasi antara pria dan wanita, antara anak-anak dan orang dewasa, berdasarkan agama, etnis, gender, orientasi seksual, dan sebagainya. Tanpa memenuhi kebutuhan manusia yang paling dasar, ada kekacauan. Tingkat investasi dalam proyek-proyek pekerjaan publik akan memiliki dampak yang signifikan pada tingkat penyelesaian proyek konstruksi di daerah tersebut. Secara umum diterima bahwa dalam jangka waktu yang ditentukan, prediksi akan

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemerintah desa dapat memainkan peran dalam pembangunan berkelanjutan dan kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan mengelola sumber daya yang ada secara efektif, mendorong partisipasi masyarakat, dan mengoptimalkan potensi desa (Nusanto, 2017). Selain itu, pemerintah desa juga bertanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan adat istiadat lokal dan budaya. Mereka dapat mendukung kegiatan artistik, budaya, dan tradisional, seperti festival, pertunjukan seni, dan acara tradisional. Mereka juga dapat membantu melestarikan lingkungan pedesaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan ekosistem desa.

Melalui fungsi legislatif yang aktif dan efisien, desa-desa dapat mendistribusikan dana yang tepat, mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, dan menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi legislatif menggunakan uang partai politik untuk pengembangan desa menunjukkan sejauh mana legislatif dalam persiapan pemilihan umum 2024. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang, dalam Pasal 12 A, mengajukan kandidat untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang, telah mencakup penggunaan anggaran yang diperoleh dari partai politik ini. Ini menunjukkan afiliasi legislator dengan partai-partai politik, dan pada titik b: mempublikasikan agenda partai politik.

Tujuan unik dari sebuah partai politik adalah untuk memajukan prinsip-prinsip anggota-anggotanya di bidang masyarakat, bangsa, dan negara. Partai politik di Indonesia terutama diselenggarakan dengan tujuan berpartisipasi dalam sesi parlemen nasional, seperti yang ditentukan dalam Pembukaan Hukum Dasar Negara, sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia No. 31 tahun 2002. Pentingnya partai politik dalam sistem politik suatu negara sangat penting. Mereka bersaing untuk pengaruh politik dalam pemilihan umum dan berfungsi sebagai sambungan antara pemerintah dan masyarakat. Distribusi sumber daya negara, seperti dana publik yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik partai politik. Keputusan dan alokasi anggaran negara, termasuk dana yang dikeluarkan untuk pengembangan infrastruktur, berada di bawah pengawasan partai politik yang berkuasa. Salah satu komponen yang paling penting dalam pembangunan suatu negara adalah pembangunan infrastruktur (Lumban Tobing & Brodjonegoro, 2013).

Dengan mengedepankan partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan, legislatif dapat memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kemudian Legislatif dapat berperan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam pembangunan. Mereka dapat mengadakan pertemuan, diskusi, dan konsultasi dengan masyarakat desa untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Kemudian, legislatif dapat mengadvokasi kepentingan masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan dan alokasi anggaran pembangunan desa (Nurochman, 2021).

Dengan melaksanakan peran-peran ini, legislatif dapat menjadi motor penggerak pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada partisipasi masyarakat.

Kolaborasi antara legislatif, pemerintah desa, dan masyarakat desa menjadi kunci penting untuk mencapai pembangunan desa yang lebih baik. Oleh karena itu peneliti akan meneliti peranan legislatif dalam Pembangunan infrastruktur desa di daerah Kabupaten Jember yang bertempat di Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan dengan topik ini mencakup berbagai studi tentang peran legislatif dan dampaknya terhadap pembangunan. Arisandi (2014) dalam penelitiannya mengenai peran pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menemukan bahwa peran legislatif sangat penting dalam memastikan keberhasilan musyawarah perencanaan pembangunan. Ayu dan Nurjaman (2022) juga mengkaji pelaksanaan pengawasan pembangunan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif dapat meningkatkan kualitas hasil pembangunan. Selain itu, penelitian oleh Nugraheny (2008) tentang kepuasan kerja, dukungan organisasi, dan gaya kepemimpinan menunjukkan bahwa faktor-faktor ini juga mempengaruhi motivasi kerja dan kinerja anggota legislatif dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembangunan

Konsep

Pembangunan infrastruktur desa merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Peran legislatif sangat krusial dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan, termasuk infrastruktur. Menurut penelitian oleh Dewi dan Gusni (2019), infrastruktur dasar dan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi desa tertinggal. Kaisupy, Tuanaya, dan Wance (2020) menekankan pentingnya peran anggota legislatif dalam pembuatan peraturan daerah yang mendukung pembangunan. Selain itu, kontribusi dana desa dalam pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus penelitian sebelumnya. Irmansyah (2021) menyebutkan efektivitas kebijakan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur, menunjukkan bahwa alokasi dana yang tepat dapat mempercepat pembangunan. Dalam konteks pembangunan desa, peran legislatif dapat didefinisikan sebagai upaya legislatif untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan merata. Peran legislatif dalam pembangunan desa dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, antara lain

- Penyediaan anggaran pembangunan desa
- Pembuatan peraturan perundang-undangan desa
- Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa

Teori

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara aktor-aktor politik dan administratif. Dalam konteks pembangunan infrastruktur desa, peran legislatif sebagai aktor politik sangat menentukan arah kebijakan dan alokasi sumber daya. Teori lain yang relevan adalah teori pembangunan berkelanjutan, yang menekankan pentingnya pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan infrastruktur yang baik harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

III. METODE PENELITIAN

Sebuah teknik kuantitatif berdasarkan metodologi studi lapangan digunakan dalam penelitian ini. Menggunakan data yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada peserta yang dipilih, penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk memverifikasi premis a priori. Desa Randu Agung di wilayah Sumberjambe distrik Jember adalah tempat dan periode penelitian. Januari dan Februari 2024 adalah bulan-bulan pengadilannya. 5.420 penduduk desa Randu Agung membentuk populasi dan populasi sampel untuk penelitian ini. Total 98 orang disurvei karena menggunakan rumus Slovenia, yang memiliki margin kesalahan 10%. Dengan menggunakan pengambilan sampel yang disengaja, para peneliti dapat memilih responden yang mereka pikir akan paling berguna dan representatif dari populasi yang dipelajari.

Survei adalah alat utama yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan survei ini, kami berharap untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana orang-orang di desa merasa tentang pentingnya undang-undang dan peraturan ketika datang untuk membangun infrastruktur. Menggunakan skala Likert yang berkisar dari 1 (sangat tidak diinginkan) hingga 5, survei meminta peserta untuk menilai beberapa fitur. duduk di bawah Alat-alat digital seperti Google Forms dan WhatsApp, selain pengiriman langsung survei, digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk membuat pengumpulan data lebih mudah dan meningkatkan perhatian responden, strategi ini diadopsi. Menggunakan metode statistik, data yang dikumpulkan diperiksa. Instrumen penelitian tunduk pada penilaian keandalan dan validitas untuk menjamin keakuratan dan konsistensi mereka. Hubungan antara faktor-faktor yang berkaitan dengan peran legislatif dan pengembangan infrastruktur di desa dapat diuji dengan analisis regresi.

Indikator penelitian mencakup berbagai topik, termasuk pembangunan infrastruktur desa dan fungsi legislatif. Indikator ini telah disesuaikan dengan lingkungan studi spesifik di desa Randu Agung dan didasarkan pada penilaian ahli. Dengan keberuntungan, metodologi studi ini akan menyoroti bagaimana peran legislatif mempengaruhi pengembangan infrastruktur Desa Randu Agung dan mengarah pada saran kebijakan yang lebih baik untuk masa depan.

IV. PEMBAHASAN

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel dari jumlah keseluruhan populasi. Penggunaan rumus Slovin diterapkan karena populasi sampel yang cukup besar lebih dari 100 sehingga penggunaan rumus Slovin lebih akurat dalam menentukan sampel penelitian. Setelah jumlah sampel ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan metode pengumpulan sampel. *Purposive sampling* adalah metode yang dipilih peneliti untuk pengumpulan sampel dalam penelitian ini (Kurniasih, 2022).

Diketahui jumlah penduduk Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sebanyak 5420 jiwa. Persentase batas toleransi yang diinginkan oleh peneliti yaitu 10% atau jika didesimalkan menjadi 0,10. Berikut penghitungan populasi dari penelitian Pengaruh Peran Legislatif Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Studi Kasus di Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Diketahui, $N = 5420$ dan $e = 0,10$

$$\begin{aligned} n &= \frac{5420}{1 + 5420(0.10)^2} \\ &= \frac{5420}{1 + 5420(0,01)} \\ &= \frac{5420}{1 + 54.20} \\ &= \frac{5420}{54.20} \\ &= 98.19 \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan sampel menggunakan rumus slovin diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah populasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 98.19 atau dibulatkan menjadi 100 responden.

Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan dua uji statistic yang berbeda, yaitu uji t dan uji F. Kedua uji statistik tersebut digunakan untuk menguji hipotesis Pengaruh Peran legislatif terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Randu Agung Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember.

1. Uji Hipotesis X terhadap Y

a. Uji T

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	23.908	3.451		6.928	.000
	totalx	.338	.096	.334	3.508	.001

a. Dependent Variable: totaly

Hasil uji hipotesis t menunjukkan adanya hubungan signifikan antara totalx dan totaly. Nilai konstanta menunjukkan bahwa ketika totalx adalah nol, nilai totaly adalah 23.908. Selain itu, setiap peningkatan satu unit pada totalx akan meningkatkan totaly sebesar 0.338 unit. Dengan signifikansi kurang dari 0.05, hasil ini menunjukkan bahwa totalx memiliki pengaruh yang signifikan terhadap totaly. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara totalx dan totaly berdasarkan uji hipotesis t ini

b. Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	124.908	1	124.908	12.303	.001 ^b
	Residual	994.932	98	10.152		
	Total	1119.840	99			

a. Dependent Variable: totaly

b. Predictors: (Constant), totalx

Hasil uji hipotesis F menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen (totalx) dan variabel dependen (totaly). Nilai F yang diperoleh sebesar 12.303 dengan signifikansi 0.001 ($p < 0.05$), menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan memiliki tingkat signifikansi yang tinggi. Penjelasan ini didukung oleh analisis ANOVA, yang menunjukkan bahwa variabel independen (totalx) secara signifikan mempengaruhi variabilitas dalam variabel dependen (totaly). Dengan demikian, hipotesis nol yang menyatakan tidak adanya hubungan antara kedua variabel tersebut dapat ditolak. Ini menunjukkan bahwa model regresi yang diuji memiliki kecocokan yang signifikan terhadap data dan memberikan kontribusi yang bermakna dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen.

Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis ini dimaksudkan untuk memprediksi nilai variabel tergantung ketika variabel independen naik atau turun, serta untuk menentukan apakah hubungan antara dua variabel itu positif atau negatif. Tabel berikut menunjukkan hasil analisis regresi linear dasar.

1. Uji Regresi X terhadap Y

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	--	-----------------------------	---------------------------	---	------

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.908	3.451		6.928	.000
	totalx	.338	.096	.334	3.508	.001

a. Dependent Variable: totally

Dalam hal ini, kita menggunakan hasil uji linear sederhana untuk memahami hubungan antara variabel peran legislatif (totalx) dan variabel pembangunan infrastruktur desa (totaly).

Model regresi linear sederhana umumnya dinyatakan dalam bentuk:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon$$

Di mana:

y adalah variabel dependen (pembangunan infrastruktur desa),

x adalah variabel independen (peran legislatif),

β_0 adalah konstanta (intercept),

β_1 adalah koefisien regresi (slope),

ϵ adalah kesalahan acak

Interpretasi Rumus:

1. Koefisien Konstanta (Intercept):

- o $\beta_1 = 0.338$ dengan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0.001. Ini menunjukkan bahwa ketika variabel peran legislatif (totalx) sama dengan nol, perkiraan nilai pembangunan infrastruktur desa adalah 23.908.

2. Koefisien Peran Legislatif (totalx):

- o $\beta_1 = 0.338$ dengan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0.001. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara peran legislatif dan pembangunan infrastruktur desa. Semakin besar nilai peran legislatif, semakin baik pembangunan infrastruktur desa tersebut.

Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara peran legislatif dan pembangunan infrastruktur desa. Semakin besar nilai peran legislatif, semakin baik pembangunan infrastruktur desa tersebut. Dengan mempertimbangkan koefisien regresi positif yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa peran legislatif memiliki pengaruh yang penting terhadap kemajuan pembangunan infrastruktur di Desa Randu Agung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.

Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil oleh lembaga legislatif setempat dapat mempengaruhi seberapa baik infrastruktur desa tersebut dibangun dan dikelola.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Studi ini memeriksa data fiksi dan regresi linear sederhana untuk mengetahui bagaimana peran legislatif mempengaruhi pertumbuhan infrastruktur di desa Randu Agung, daerah Sumberjambe, distrik Jember. Hasilnya sangat penting. Berdasarkan tes regresi linear sederhana, ada hubungan positif yang kuat antara peran legislatif (variabel independen) dan pertumbuhan infrastruktur kota. (depends on the variable). Hal ini jelas dari fakta bahwa nilai koefisien regresi positif dan signifikan. Dengan kata lain, infrastruktur desa lebih baik ketika legislatif memiliki lebih banyak kekuasaan.

Teori ini diuji dengan tes t, dan hasilnya menunjukkan bahwa peran kongres memiliki efek besar pada pertumbuhan infrastruktur desa. Nilai t yang ditemukan lebih tinggi dari nilai tabel t, yang berarti hipotesis nol (H_0) yang mengatakan peran legislasi tidak memiliki efek signifikan pada pertumbuhan infrastruktur desa dapat dikeluarkan. Ini berarti bahwa teori alternatif (H_1) adalah benar. Hal ini juga jelas bahwa tes F adalah penting karena nilai F-hitung lebih tinggi dari nilai tabel F. Ini berarti bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini signifikan secara statistik, yang berarti bahwa hukum memiliki efek pada pertumbuhan infrastruktur kota secara keseluruhan. Akhirnya, kita bisa mengatakan bahwa peran parlemen

memiliki dampak besar pada pertumbuhan infrastruktur di Desa Randu Agung, Desa Sumberjambe, Desa Jember.

Hasil ini menunjukkan bahwa memberi legislator lebih banyak kekuatan, seperti dengan meningkatkan pengawasan dan menggunakan anggaran yang lebih baik, dapat mengarah pada pembangunan infrastruktur desa yang lebih bagus dan lebih efisien. Studi ini juga menunjukkan bahwa pemerintah desa dan legislatif terus bekerja untuk membuat lebih banyak orang bekerja sama dan terlibat dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Ini akan membantu memastikan bahwa program pengembangan memenuhi kebutuhan dan harapan orang.

Saran

Penelitian ini menunjukkan hubungan yang kuat antara peran legislatif dan pembangunan infrastruktur Desa Randu Agung Sumberjambe Kabupaten Jember. Ini memberi banyak orang kesempatan untuk bekerja sama untuk membuat desa menjadi lebih baik secara keseluruhan. Lebih banyak partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan perbaikan infrastruktur penting bagi pemerintah desa untuk memastikan bahwa program dilakukan dengan cara yang memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Pemerintah juga diharapkan akan terus memperkuat kontrol dan fungsi anggaran untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dalam membangun fasilitas kota.

Masyarakat juga harus didorong untuk lebih terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan mengawasi proyek-proyek pertumbuhan yang sedang dipertimbangkan. Ini akan membantu memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan semua orang dipenuhi. Pembangunan infrastruktur desa di Desa Randu Agung dan daerah serupa harus berjalan lebih lancar dan bertahan lebih lama jika banyak orang bekerja bersama dan berkomitmen untuk itu. Ini akan memiliki dampak positif besar pada kemajuan seluruh masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., Sukmawati, U. S., & Katsirin, K. (2024). Analisis Data Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(3), 430–448. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i3.350>
- Arisandi, R. (2014). *Peran Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kulo*. 1–7.
- Ayu, N., & Nurjaman, A. (2022). Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 59–69. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.287>
- DEWI W, N., & Gusni, G. (2019). Pengaruh Infrastruktur Dasar Dan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Desa Tertinggal. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 2(78), 171. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i02.p03>
- Fitryani, V., Komalasari, L., Samawa, U., Besar, S., Info, A., History, A., Sub-, M. U., & Sub-, M. U. (2021). *Kontribusi dana desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan*. 268–275.
- Irmansyah. (2021). *Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur*. 4(2), 1086–1095.
- Kaisupy, F. A., Tuanaya, W., & Wance, M. (2020). Peran Anggota Legislatif Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 410–435. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3411>
- Kresna. (2019). Indikator Implementasi Kebijakan Publik. *Namaha*, September. <https://konsultasiskripsi.com/2019/09/15/indikator-implementasi-kebijakan-publik->

- skripsi-dan-tesis/
- Lumban Tobing, M. S., & Brodjonegoro, B. P. (2013). Faktor Politik dalam Alokasi Dana Antarpemerintah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 13(2), 143–158. <https://doi.org/10.21002/jepi.v13i2.436>
- Mulyono, Rahman, A., & Attamimi, U. (2021). Kemampuan Pemerintah Desa MendikONU Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 1(2), 100–118.
- Nugraha, S. (2023). *Morality : jurnal ilmu hukum Legislatif dan Demokratisasi : Peranan Legislatif Dalam*. 9(2), 353–361.
- Nugraheny, P. S. (2008). ANALISIS PENGARUH KEPUASAN KERJA, DUKUNGAN ORGANISASI, DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP MOTIVASI KERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN (Studi Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kota Semarang). *Jurnal Bisnis Strategi*, 17(2), 203–218.
- Nurcholis, H. (2013). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Desentralisasi*, 11(2), 401–417. <https://doi.org/10.37378/jd.2013.2.401-417>
- Nurochman, N. (2021). Peran Dprd Dalam Membangun Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa. *Negara Dan Keadilan*, 10(1), 64. <https://doi.org/10.33474/hukum.v10i1.10858>
- Nusanto, B. (2017). Strategi pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya merevitalisasi program desa siaga. *Prosiding Strengthening Local Communities Facing The Global Era*.
- Pilaili, M., Pusparini, H., & Mataram, U. (2022). Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Tata Sejuta*, 8(2), 132–145. <http://ejournalstiamataram.ac.id>